



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD JALU WREDO ARIBOWO
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 31419

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/107 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/163 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 365.000.000

1. MOTOR, HONDA MEGA PRO MOTOR Tahun 2006, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 6.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOBIL, CHERRY OMODA E5 OMODA E5 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 299.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 355.963.400

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 628.455.273

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	3.724.418.673
III. HUTANG	Rp.	147.727.684
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.576.690.989

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.